**ANALISIS LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS PADA KURIKULUM
UNTUK SEKOLAH LUAR BIASA TERHADAP PESERTA DIDIK
BERKEBUTUHAN KHUSUS DI INDONESIA**

Hilma Rahmatillah¹, Siti Nurjannah², Yeni Irma Normawati³

hilmarahmatillah5@gmail.com¹, sitinurjannah@ummah.ac.id², yeninormawati01@gmail.com³

Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua orang dari semua kalangan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, begitu juga dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik dengan berbagai hambatan dan gangguan memiliki kebutuhan yang khusus dalam pendidikan. Oleh karena itu, layanan yang diberikan juga harus layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kurikulum yang dirancang juga harus dirancang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pendidikan yang dimiliki. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis konten. Di Indonesia khususnya di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus dengan sistem segregasi atau Sekolah Luar Biasa. Rancangan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dibuat berdasarkan kekhususannya seperti, hambatan sensorik (penglihatan/pedengaran), hambatan emosional, hambatan intelektual, dan hambatan fisik dan motorik. Upaya dalam memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik adalah dengan merancang program pembelajaran khusus yang dirancang untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang dimaksud. Lalu, modifikasi kurikulum juga dapat dilakukan jika sekiranya peserta didik memiliki hambatan yang kebutuhan khusus yang lebih spesifik dalam pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada rancangan Kurikulum.

Kata Kunci: Layanan Pendidikan, Kurikulum, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

ABSTRACT

Education is a right for all Indonesian people. Everyone from all walks of life has the same right to get an education, as well as students with special needs. Students with various barriers and disorders have special needs in education. Therefore, the services provided must also be services that suit their needs, and the designed curriculum must also be designed according to the characteristics and educational needs they have. This research method is a qualitative descriptive method with a content analysis approach. In Indonesia, especially in Special Education Organizing Schools with a segregation system or Special Schools. The curriculum design made by the government for students with special needs is based on their specificities, such as sensory (vision/hearing) barriers, emotional barriers, intellectual barriers, and physical and motoric barriers. Efforts to provide educational services that suit the needs of students are to design special learning programs designed for students with special needs in question. Then, curriculum modifications can also be made if students have more specific special needs barriers in education. The purpose of this study is to provide a clear picture of educational services for students with special needs in the curriculum design.

Keywords: *Special Education Services, Curriculum, Students With Disabilities.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah proses yang dilalui untuk merubah seorang individu. Pendidikan memberikan pengalaman dan mengajarkan pengetahuan sebagai bekal dalam proses pendewasaan. Oleh karena itu, pendidikan sangatlah penting bagi setiap individu bagi kehidupannya. Di Indonesia, pendidikan merupakan hak setiap individu seperti yang dituliskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan UUD 1945 tersebut pemerintah menyediakan layanan pendidikan formal dan nonformal bagi seluruh

rakyat Indonesia, termasuk pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan berbagai macam disabilitas.

Bentuk layanan pendidikan yang menyediakan pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang diselenggarakan di Indonesia ada 2 macam yaitu pelayanan pendidikan dengan sistem segregasi yang disebut Sekolah Luar Biasa (SLB) dan pelayanan pendidikan secara Inklusif yaitu Sekolah Inklusif. Sekolah Inklusif menawarkan pendidikan bagi semua peserta didik baik peserta didik berkebutuhan khusus ataupun tidak. Pelaksanaan pendidikan membutuhkan perencanaan yang berisi tujuan, isi, dan bahan sebagai pedoman, dan semua hal ini tertuang dalam kurikulum (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 20 TAHUN 2003 PENDIDIKAN NASIONAL, 2003). Pemerintah merancang Kurikulum yang menjadi pedoman bagi seluruh Lembaga pendidikan di Indonesia dalam praktik pendidikan.

Menurut Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, sejauh ini Kurikulum di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya kebutuhan pelajar terhadap pendidikan. Perubahan kurikulum dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Itjen Kemendikbud mencatat setidaknya ada 4 kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia yaitu, 1) Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004, kurikulum ini menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta didik yang berorientasi pada hasil belajar dan ketercapaian terhadap pengetahuan, keterampilan, dan nilai; 2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006, pada kurikulum ini guru dituntut mampu mengembangkan silabus dan penilaian sesuai lingkungan tempatnya mengajar, namun secara isi dan proses pencapaian kompetensi tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya; 3) Kurikulum 2013 (K-13) pada tahun 2013, kurikulum ini merupakan kurikulum pengganti dari kurikulum sebelumnya, kurikulum ini menekankan keaktifan siswa dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar dan mengkomunikasikan materi pelajaran; 4) Kurikulum Merdeka yang diluncurkan pada tahun 2022, konten dalam kurikulum merdeka dianggap lebih optimal untuk menguatkan konsep dan menguatkan kompetensi peserta didik (Romanti, 2022).

Menurut Anwar, berikut adalah kurikulum yang pernah diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia yaitu, 1), kurikulum 1947, kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan, yang dilaksanakan pada tahun 1950, kurikulum berfokus pada pembentukan karakter peserta didik terhadap kemerdekaan Indonesia yang berdaulat dan sama seperti negara merdeka lainnya dan konten yang diajarkan berisi pendidikan karakter untuk kesadaran dalam bernegara dan bermasyarakat; 2) kurikulum 1952, silabus pada kurikulum ini disusun berdasarkan mata pelajaran, dan materi pelajaran diajarkan berdasarkan pengalaman yang dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari para peserta didik; 3) kurikulum 1964, pembelajaran dikembangkan berdasarkan program Panchawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistic, keterampilan (keprigelan), dan jasmani, 4) kurikulum 1968, kurikulum ini diterapkan pada masa orde baru, rencana pendidikan dalam kurikulum ini bersifat politis dan berpusat pada pembentukan karakter Pancasila yang kuat pada peserta didik, dan juga bertujuan untuk mencerdaskan peserta didik, meningkatkan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama seluruh peserta didik; 5) kurikulum 1975, kurikulum ini dirancang berdasarkan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) yang melhairkan satuan pelajaran; 6) kurikulum 1984, kurikulum ini mengusung metode Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), siswa merupakan subjek belajar dengan mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, dan melaporkan; 7) kurikulum 1994, kurikulum ini dirancang dengan menggabungkan kurikulum sebelumnya; 8) kurikulum 2004, disebut dengan istilah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan 3 unsur pokok, yaitu kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran; 9) kurikulum 2006, dikenal dengan istilah Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP), dengan dua unsur utama yaitu kompetensi dan kompetensi sadar; 10) kurikulum 2013, kurikulum ini memiliki 3 aspek penilaian yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku (Anwar, 2020). Pada tahun 2020 pemerintah Indonesia mulai merencanakan perubahan Kurikulum dari yang sebelumnya kurikulum 2013 direncanakan akan digantikan dengan Kurikulum Merdeka yang akhirnya mulai dilaksanakan pada tahun 2022.

Sekolah Luar Biasa merupakan salah satu satuan pendidikan yang didirikan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik dengan kelainan dan hambatan, Education Destination Asia menggunakan istilah SEN (Special Education Needs) untuk menggambarkan pendidikan khusus, di Indonesia SEN dikenal dengan istilah Sekolah Luar Biasa (SLB), peserta didik yang berhak mendapatkan layanan pendidikan di SLB adalah peserta didik dengan hambatan penglihatan (tunanetra), hambatan pendengaran (tunarungu), hambatan fisik dan motorik (tunadaksa), autisme, hambatan intelektual, dan peserta didik dengan berbagai hambatan lainnya (Education Destination in Asia, 2022). Semua peserta didik yang memiliki hambatan dan gangguan dapat bersekolah di SLB dan menerima pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan rancangan kurikulum yang telah ada.

Setiap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari perbedaan dari tingkatan hambatan yang dimiliki sampai perbedaan pada kebutuhan belajarnya. Belum lagi peserta didik dengan yang memiliki hambatan ganda, yang umumnya sangat susah untuk dideteksi. Berdasarkan masalah tersebut, maka artikel ini akan membahas bagaimana rancangan kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus ganda di Indonesia, dan bagaimana implementasinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, kurikulum merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pendidikan, karena kurikulum berisi seluruh proses perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Oleh karena itu, kurikulum harus dapat menggambarkan perencanaan pembelajaran bagi peserta didik baik mereka yang bersekolah di Sekolah Reguler, Sekolah Inklusif, dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif deskriptif dengan metode analisis konten. Analisis konten harus menjelaskan darimana asal sumber data yang digunakan, apakah berasal dari pembuat konten atau dari pengguna konten. Apakah data merepresentasikan konseptualisasi dan pilihan sumber data akan menentukan bahwa data yang dikumpulkan didikte dengan benar. Analisis konten juga harus mempertimbangkan motivasi yang mungkin dimiliki pengguna untuk berbagi konten agar dapat memahami hubungan mereka dengan konten tersebut dengan sebaik-baiknya (Neuendorf et al., 2002).

Menurut Cavanagh, Peneliti menganggap bahwa metode analisis isi atau analisis konten sebagai metode yang fleksibel untuk menganalisis data teks. Analisis konten adalah teknik penelitian kualitatif yang banyak digunakan. Pengaplikasian analisis konten saat ini menyarankan tiga pendekatan berbeda: konvensional, tertarget, atau sumatif. Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menginterpretasikan makna isi data teks sehingga menganut paradigma naturalistik. Perbedaan utama antara pendekatan tersebut adalah skema pengkodean, asal kode, dan ancaman terhadap kepercayaan. Dalam analisis isi konvensional, pengkodean kategori diturunkan langsung dari data teks. Dengan pendekatan terarah, analisis dimulai dengan teori atau temuan penelitian yang relevan sebagai panduan kode awal. Analisis konten sumatif melibatkan penghitungan dan perbandingan, biasanya kata kunci atau konten, diikuti dengan interpretasi konteks yang mendasarinya. Para penulis menjelaskan prosedur analitis khusus untuk setiap pendekatan (Hsieh & Shannon, 2005).

Analisis konten merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi yang valid dan

dapat diteliti ulang dari data berdasarkan konteksnya. (Zuchdi & Wiwiek, 2021). Pada penelitian ini sumber data akan berfokus pada naskah kurikulum merdeka dan juga Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia, dan artikel terkait sebagai sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merancang Kurikulum Merdeka sebagai salah satu upaya dalam pemulihan pembelajaran setelah pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang besar bagi terlaksananya sistem pendidikan di Indonesia (Kemendikbudristek, 2022). Sebelumnya Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang digunakan sebagai sumber utama dalam perencanaan pembelajaran di kelas. Perubahan Kurikulum juga dilakukan, pada masa pandemi Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Darurat, Kurikulum Darurat ini merupakan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Setelah pandemi mulai mereda, pemerintah mengeluarkan Kurikulum Merdeka sebagai rancangan dalam masa pemulihan pendidikan di Indonesia.

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan khusus wajib memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial. Keterampilan dasar yang dibagi berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik adalah sebagai berikut, 1) keterampilan menulis braille untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan penglihatan; 2) keterampilan orientasi dan mobilitas; 3) keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama peserta didik yang berkebutuhan khusus; 4) keterampilan komunikasi dalam bentuk sarana, dan format yang bersifat augmentative dan alternatif; 5) keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistic dari komunitas penyandang disabilitas rungu(UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, 2016). Fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus untuk meningkatkan keterampilannya merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi perkembangan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dalam rangka memfasilitasi kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan merupakan upaya yang sangat penting dilakukan.

Menurut Idhartono dan Badi'ah Kurikulum Merdeka Belajar adalah hasil dari kurikulum 2013 setelah evaluasi dilakukan, kurikulum merdeka belajar lebih ringkas daripada kurikulum 2013 (K-13), Implementasi kurikulum merdeka terdiri dari semua jenjang satuan pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, dan SLB. Kurikulum Merdeka Belajar dikemas sederhana dan mendalam yang difokuskan pada esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan tingkatan fasenya. Karakteristik Kurikulum Merdeka Belajar meliputi (1) pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan softskill dan karakter sesuai dengan profil Pelajar Pancasila, (2) difokuskan pada materi yang esensial seperti literasi dan numerasi, dan (3) fleksibel bagi guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks lokal dan muatan lokal (Rizky Idhartono et al., 2022). Kurikulum merdeka dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dengan mengembangkan berbagai keterampilan softskill sebagai bekal untuk menghadapi perkembangan zaman dan pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai luhur yang menjadi bekal peserta didik dalam kehidupan bernegara.

Program yang mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) adalah adanya program Sekolah Penggerak (SP) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK) dimana Kemendikbudristek pada program tersebut memberikan dukungan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dari dua kegiatan tersebut didapatkan pengalaman yang baik dalam mengimplementasikan KM sehingga menjadi praktik baik dan konten pembelajaran dari IKM pada SP/SMK-PK teridentifikasi dengan baik dan dapat menjadi pembelajaran bagi satuan pendidikan lainnya (Kemendikbud, 2022a). Pelaksanaan Kurikulum

Merdeka dilaksanakan secara berkala dengan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1) pada tahap pertama, pelaksanaan kurikulum merdeka dilaksanakan bagi peserta didik dengan usia 5-6 tahun pada satuan pendidikan usia dini (PAUD), lalu peserta didik di kelas I, kelas IV di jenjang pendidikan dasar atau SD, kelas VII pada jenjang pendidikan menengah, dan kelas X untuk jenjang pendidikan menengah atas; 2) pada tahap kedua, pelaksanaannya bagi peserta didik dengan usia 4-6 tahun di jenjang PAUD, kelas I, kelas II, kelas IV, kelas V di jenjang pendidikan SD dan kelas VII, kelas VIII untuk jenjang pendidikan menengah, dan kelas X, dan kelas XI pada jenjang menengah atas; 3) pada tahun ketiga, pelaksanaan kurikulum dilakukan pada peserta didik semua jenjang satuan pendidikan dan semua tingkat kelas, mulai dari peserta didik dengan usia 3-18 tahun dengan satuan pendidikan PAUD-SMA dan sederajat (Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, 2022). Sekolah Penggerak dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan akan menjadi contoh sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan secara bertahap.

Kurikulum Merdeka bagi peserta didik berkebutuhan khusus dirancang berdasarkan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh peserta didik tersebut dengan dengan keterampilan fungsional dan mata pelajaran tambahan sebagai penunjang. Mata pelajaran penunjang sesuai dengan kebutuhan peserta didik disebut dengan Program Kebutuhan Khusus yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik seperti indra untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Berdasarkan tujuannya, masing-masing jenis kebutuhan khusus memiliki tujuan yang berbeda-beda, berikut penjabarannya: 1) tunanetra, untuk pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi; 2) tunarungu, untuk pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama; 3) tunagrahita, untuk pengembangan diri; 4) tunadaksa, untuk pengembangan diri dan gerak; dan 5) autisme, untuk pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku (Kemdikbud, 2021b). Kurikulum untuk Sekolah Luar Biasa memiliki Program Kebutuhan Khusus yang dirancang berdasarkan kebutuhan dengan memaksimalkan potensi peserta didik, dengan tujuan yang berbeda pada kebutuhan khusus yang dimiliki.

Struktur kurikulum SLB mengacu kepada struktur kurikulum SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang disesuaikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual. Untuk peserta didik yang tidak mengalami hambatan intelektual dapat menggunakan kurikulum pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Penyesuaian struktur kurikulum dimaksud dilakukan terhadap keterampilan fungsional dan mata pelajaran yang menunjang kebutuhan. Peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak memiliki hambatan intelektual di SLB atau Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat menggunakan struktur kurikulum dan capaian pembelajaran pendidikan reguler sesuai jenjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip modifikasi kurikulum, dan peserta didik berkebutuhan khusus dari SLB dapat melanjutkan pendidikannya ke Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan mengikuti kelas transisi (Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, 2022). Berdasarkan putusan tersebut maka, peserta didik berkebutuhan tanpa hambatan intelektual lebih diarahkan untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Reguler dengan Layanan Inklusif. Peserta didik ini juga dapat menerima pembelajaran berdasarkan kurikulum reguler, namun ada penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan keterampilan fungsional dan kebutuhan peserta didik. Sehingga adanya modifikasi kurikulum yang dilakukan guna rancangan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dapat tetap terpenuhi.

Peraturan Menteri tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa akomodasi yang dimaksud disini adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa penyediaan akomodasi yang layak dilakukan paling sedikit ada empat poin yang disampaikan dan pada poin (d) penyediaan kurikulum (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Yang Layak Peserta Didik Penyandang Disabilitas, 2020). Kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus tidak hanya dikategorikan berdasarkan hambatan yang dimiliki saja. Ada banyak faktor lain yang membuat kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dalam pembelajaran dan pendidikan di sekolah beragam, misalnya tingkat hambatan yang berbeda dan sulit untuk diukur secara akurat, lalu tingkat kecerdasan yang sulit untuk dilakukan tes terhadap peserta didik dengan hambatan indera pendengaran dan penglihatan, lalu dalam beberapa kasus ada peserta didik yang memiliki hambatan ganda atau memiliki kelainan comorbid, sehingga kebutuhannya dalam pendidikan akan berbeda dengan peserta didik berkebutuhan khusus lain yang hanya memiliki tingkat kelainan yang ringan atau mereka dengan hambatan tinggal saja. Oleh karena itu, pemerintah menyusun Permen Nomor 13 tahun 2020, yang didalamnya menjelaskan tentang segala akomodasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pada pasal 9 Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas. (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a) Penyandang Disabilitas fisik; b) Penyandang Disabilitas intelektual; c) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d) Penyandang Disabilitas sensorik: (1) disabilitas netra; dan/atau; (2) disabilitas runtu dan/atau disabilitas wicara (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Yang Layak Peserta Didik Penyandang Disabilitas, 2020). Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2020, menjelaskan dengan rinci setiap akomodasi yang layak diberikan kepada peserta didik berdasarkan kebutuhannya. Semua akomodasi yang dibutuhkan guna mendapatkan pendidikan yang maksimal juga dicantumkan, seperti kebutuhan akan sarana prasarana yang memadai atau bahkan dimodifikasi yang sekiranya dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus seperti penyediaan bidang miring untuk memudahkan peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan fisik motorik yang menggunakan kursi roda lebih mudah untuk mengakses sisi lain dari sebuah bangunan, lalu adanya guiding block yang merupakan tuntunan bagi tunanetra dalam mobilitasnya dan menentukan posisi dan arah berjalan, dan lain sebagainya.

Kurikulum yang digunakan sebagai sumber belajar utama oleh Satuan Pendidikan Luar Biasa atau SLB adalah kurikulum modifikasi dimana kurikulum ini diambil dari kurikulum nasional, disederhanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Kurikulum bagi siswa berkebutuhan khusus disajikan dalam bentuk Individual Learning Program (PPI). Sekolah yang peduli terhadap proses pembelajaran, terutama guru penanggung jawab siswa atau guru pendidikan luar biasa (GPK), ikut serta dalam pembentukan PPI ini, di bawah arahan kepala sekolah. Sebelum merancang PPI, guru melakukan penilaian atau identifikasi untuk mengetahui kelemahan dan peluang siswa. PPI dibuat secara bertahap pada setiap semester jika siswa melihat ada peningkatan dalam belajarnya. Tujuan penerapan kurikulum revisi ini adalah untuk memfasilitasi pembelajaran siswa ABK dengan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, bahkan dengan kelainan yang sama (Natalia & Nisa, 2020). Peserta didik yang membutuhkan program pembelajaran yang berbeda dapat dilakukan dengan melakukan modifikasi pada kurikulum. Modifikasi yang dilakukan dapat berupa penyederhanaan materi, hasil dari modifikasi kurikulum adalah PPI. PPI merupakan rancangan rencana pendidikan yang bersifat individual, oleh karena itu setiap peserta didik akhirnya akan memiliki PPI sendiri yang berbeda dengan peserta didik lain yang juga memiliki PPI. PPI nantinya akan menjadi panduan guru dalam melaksanakan pembelajaran bagi peserta. Umumnya PPI

Capaian belajar (CP) adalah kompetensi belajar yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan sejak tahap pendirian PAUD dan seterusnya. Capaian pembelajaran mencakup berbagai keterampilan dan kumpulan materi yang disusun dalam format naratif yang komprehensif. Capaian pembelajaran mencakup berbagai keterampilan dan kumpulan materi

yang disusun dalam format naratif yang komprehensif. Hasil belajar pendidikan anak usia dini (PAUD) terdiri dari satu fase yaitu fase pembentukan. Hasil Belajar SD dan SMP terdiri dari 6 jenjang (A-F) atau tingkatan yang mencakup seluruh jenjang SD dan SMP (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SDLB, SMPLB, SMALB, Paket A, Paket B dan Paket .C). Capaian belajar primer dan sekunder juga disusun untuk setiap mata pelajaran. Peserta didik penyandang disabilitas perkembangan yang memiliki kebutuhan khusus dapat menggunakan CP Pendidikan Khusus. Sementara itu, siswa berkebutuhan khusus tanpa disabilitas intelektual dapat menggunakan CP umum dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum (Kemdikbud, 2022a).

Kurikulum Merdeka disusun berdasarkan Fase perkembangan peserta didik. Pada implementasinya penentuan fase pada peserta didik didasarkan pada hasil asesmen diagnostik, sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, misalnya: salah satu peserta didik pada kelas X SMALB (fase E) berdasarkan hasil asesmen diagnostik berada pada fase C sehingga pembelajaran peserta didik tersebut tetap mengikuti hasil asesmen diagnostik yaitu fase C (Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, 2022).

Tujuan pembelajaran merupakan gambaran pencapaian tiga aspek kompetensi, yaitu. pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan memperhatikan suatu indikator atau layar yang dapat diamati dan diukur oleh siswa sehingga dapat dikatakan bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menulis harus memiliki 2 komponen utama, kompetensi dan cakupan materi (Kemdikbud, 2022a). Tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam kurikulum merdeka harus menggambarkan 3 aspek yang telah disebutkan.

KESIMPULAN

Kurikulum Merdeka bagi peserta didik berkebutuhan khusus dirancang berdasarkan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh peserta didik tersebut dengan dengan keterampilan fungsional dan mata pelajaran tambahkan sebagai penunjang. Mata pelajaran penunjang sesuai dengan kebutuhan peserta didik disebut dengan Program Kebutuhan Khusus yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik seperti indra untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Berdasarkan tujuannya, masing-masing jenis kebutuhan khusus memiliki tujuan yang berbeda-beda, berikut penjabarannya: 1) tunanetra, untuk pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi; 2) tunarungu, untuk pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama; 3) tunagrahita, untuk pengembangan diri; 4) tunadaksa, untuk pengembangan diri dan gerak; dan 5) autisme, untuk pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas. (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a) Penyandang Disabilitas fisik; b) Penyandang Disabilitas intelektual; c) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d) Penyandang Disabilitas sensorik: (1) disabilitas netra; dan/atau; (2) disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.

Kurikulum yang digunakan dalam satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa merupakan acuan dalam pelaksanaan pendidikan. Namun, jika terdapat peserta didik yang memiliki karakteristik khusus yang sekiranya membutuhkan akomodasi khusus dalam layanan pendidikan. Maka, guru sebagai seorang pendidik dan beberapa pihak lain yang ikut serta dalam pelaksanaan pendidikan perlu menyediakan kurikulum yang diakomodasi sesuai dengan kebutuhan pendidikan peserta didik tersebut.

Saran

Dalam perancangan kurikulum yang telah ada. Semua konten berisi tentang peserta didik berkebutuhan khusus tunggal yang dikategorikan ke dalam beberapa kelompok untuk kemudian dipetakan sesuai kebutuhan dan tahapan perkembangannya yang kemudian menjadi pertimbangan dalam perancangan kurikulum yang dikhususkan untuk mereka. Namun, ada beberapa karakteristik peserta didik yang masih luput dan jarang dijadikan bahan kajian sebagai pertimbangan pembuatan kurikulum bahkan pembuatan kebijakan, yaitu peserta didik berkebutuhan khusus ganda. Peserta didik dengan kebutuhan khusus ganda memang jarang ditemui kasusnya, karena sulitnya untuk mendeteksi keakuratan dari kedua atau lebih hambatan yang dimiliki. Namun, dalam layanan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus ganda memerlukan layanan pendidikan yang lebih spesifik yang tentunya berbeda dengan peserta didik berkebutuhan khusus tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (2020). Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Indonesia. BINUS UNIVERSITY. <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/sejarah-perjalanan-kurikulum-pendidikan-indonesia/>
- Education Destination in Asia. (2022). Special Education Needs (SEN) In Indonesia. Education Destination in Asia. <https://educationdestinationasia.com/essential-guide/indonesia/special-education-needs-sen-indonesia>
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Kemdikbud. (2021b). Struktur Kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. <https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/detail-ikm/>
- Kemdikbud. (2022a). Mengenal Capaian Pembelajaran (CP) Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. <https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/11339210155161->
- Kemendikbudristek. (2022). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 1 (2022).
- Natalia, D., & Nisa, A. F. (2020). IMPLEMENTASI MODIFIKASI KURIKULUM PADA MATA PELAJARAN IPA DI SEKOLAH DASAR INKLUSI (STUDI PADA SISWA KELAS VI SD 1 TRIRENGGO BANTUL). *TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 6(2). <https://doi.org/10.30738/trihayu.v6i2.8052>
- Neuendorf, K. A., Skalski, P. D., Cajigas, J. A. (Julie A., & Allen, J. C. (Jeffery C. (2002). *The content analysis guidebook* (K. Omer, S. Dillard, L. Larson, & A. Harris, Eds.; 2nd ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Presiden Republik Indonesia (2020).
- Rizky Idhartono, A., Isni Badi, L., praktek, S., & Merdeka Belajar, K. (2022). STRATEGI PRAKTEK PEMBELAJARAN KURIKULUM MERDEKA Informasi Artikel Abstrak Kata kunci: Vol. II (Issue 2).
- Romanti, M. A. (2022). Berbagai Kurikulum Yang Pernah Diterapkan di Indonesia. *INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK*. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/berbagai-kurikulum-yang-pernah-diterapkan-di-indonesia/>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, Pub. L. No. pasal 4, Pemerintah Republik Indonesia (2003).
- UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, (2016).
- Zuchdi, D., & Wiwiek, A. (2021). Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika Dalam Penelitian (R. Damayanti, Ed.; 1st ed.). Bumi Aksara.